

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi menurut Suryo Sakti (2012:33) merupakan bentuk pemerintahan dimana kebijakan secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam sistem politik Indonesia yang menganut paham demokrasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, terlihat dari pemilihan umum secara langsung yang dimana rakyatlah yang memilih langsung orang yang akan duduk untuk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku saat ini. Untuk itu demokrasi harus membuahkan hasil yang nantinya bisa dirasakan sendiri oleh rakyat, seperti kesejahteraan yang meningkat, penyelenggaraan negara yang lebih baik, juga ketentraman yang dirasakan masyarakat terjamin.

Suryo Sakti (2012: 63) menyebutkan aspek penting dari adanya suatu demokrasi yaitu partisipasi politik. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka rakyat

berhak untuk ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam politik.

Dalam partisipasi masyarakat yang melakukan pemilihan Anthonius Sitepu (2012:183) berpendapat bisa dipengaruhi oleh faktor sosiologis terhadap perilaku pemilih yakni kelas sosial, ekonomi, agama, etnis, gender, dan juga aspek daerah tempat tinggal. Ada beberapa faktor utama yang membentuk pengaruh partisipasi di Indonesia salah satunya adalah faktor etnisitas.

Kelompok etnis mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi perseorangan. Dengan adanya rasa kesukuan atau kedaerahan tersebut sehingga dapat mempengaruhi dukungan seseorang terhadap suatu partai politik. Etnis juga dapat mempengaruhi loyalitas terhadap partai tertentu.

Dalam sebuah kontestasi politik lokal seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat politik etnis identik dengan politik elite Dayak sehingga terjadi sebuah persaingan antara identitas etnis Dayak dan Melayu untuk mendapatkan kekuasaan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Orang Dayak merupakan segmen masyarakat di Kalimantan Barat yang sering menggunakan sentimen etnis sebagai representasi dalam birokrasi.

Dengan adanya persaingan itu tentunya dibutuhkan strategi untuk meningkatkan dukungan seperti pembentukan sebuah lembaga, etnis Dayak

dengan membentuk lembaga MAD (Majelis Adat Dayak) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat Dayak pada ranah politik dengan tujuan mendapatkan posisi politik bagi orang Dayak. Sedangkan etnis Melayu mendirikan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), yang memiliki tujuan untuk mewakili kepentingan orang Melayu yang secara aktif mempromosikan kepentingan-kepentingan Melayu dalam sebuah pemilihan. Identitas etnis menjadi peranan penting dalam memainkan politik di Kalimantan Barat, tetapi dengan cara yang adil dan damai sebagai proses pembelajaran demokrasi di Kalimantan Barat itu sendiri.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam milih pemimpin daerah. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik untuk memilih maupun dipilih karena setiap warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik.

Fenomena pemilihan kepala daerah sering memperlihatkan penggunaan primordial, seperti suku, etnis, ras, dan agama kedalam ranah politik seperti pada saat kampanye. Selain kemampuan calon menyampaikan visi dan misinya, dalam menetapkan pilihan rakyat sebagai pemilih akan memilih calon kepala daerah tersebut dalam konteks karena persamaan ikatan primordial (suku, agama, dan ras).

Kota Binjai sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang hanya berjarak \pm 22Km dari pusat Kota Medan. Kota Binjai yang memiliki luas 9.023,62 Ha (\pm 90,23 Km²) terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan. Penduduk Kota Binjai pada Tahun 2015 berjumlah 264. 687

jiwa. Penduduk Kota Binjai sendiri terdiri dari berbagai etnis antara lain Melayu, Jawa, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Minang, Aceh dan China dengan pemeluk agama mayoritas Islam dan yang mempunyai kesadaran politik dan keamanan yang cukup tinggi (diakses dari situs <http://www.binjaikota.go.id/profil-13.html>).

Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2015, Kota Binjai termasuk salah satunya yang ikut dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Binjai yang di ikuti oleh 3 pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan yang akan bertarung dalam Pilkada tersebut yaitu Pasangan calon Nomor urut 1. H.Muhammad Idaham - Timbas Tarigan yang didukung oleh partai Demokrat dan PKS, pasangan calon ini berasal dari etnis Melayu dan Karo, Nomor urut 2. Juliadi - H.Muhammad Tulen yang didukung oleh partai PDIP dan PAN, pasangan calon ini berasal dari etnis Jawa, dan pasangan calon Nomor urut 3. H.Saleh Bangun - Dhani Setiawan Isma yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, pasangan calon ini berasal dari etnis Karo dan Jawa (diakses dari situs <https://pilkada2015.kpu.go.id/binjaikota>).

Sebuah dinamika politik lokal yang terjadi di Kota Binjai menjelang pemungutan suara pada 9 Desember 2015, yaitu salah satu calon Walikota Binjai yang tersangkut masalah korupsi dan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada tanggal 3 November 2015 karena diduga menerima suap dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho terkait kasus keuangan daerah. Namun dalam hal ini, calon tersebut masih tetap akan melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan pilkada sampai ada putusan yang tetap dari pengadilan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membernarkan langkah KPU Binjai, yang menganggap status calon walikota

tersebut masih sah sebagai calon kepala daerah. Artinya, masih berpeluang memimpin Binjai bila terpilih oleh masyarakat dalam proses pemungutan suara (<http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/17/jadi-tersangka-pecalonan-kepala-daerah-tetap-sah-ini-kajiannya>).

Dengan beragamnya identitas etnis yang ada di Binjai, terjadi persaingan antar etnis dalam momentum pilkada, dimana para calon menggunakan simbol identitas etnisnya untuk ditampilkan bahwa ia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengannya untuk membangun eksistensi dari kelompok etnis tersebut. Dengan usaha seperti itu, para calon mengharapkan masyarakat memberikan kepercayaannya bahwa harus ada wakil dari kelompok etnis itu untuk menduduki jabatan kekuasaan.

Sebagai elit politik yang ingin menadapatkan tempat kekuasaan pada suatu daerah yang dapat memanfaatkan dari adanya kelompok-kelompok etnis yang ada. Maka untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, para kandidat melakukan pendekatan-pendekatan dengan perkumpulan dari kelompok etnisnya sendiri maupun dengan kelompok etnis lain, dengan begitu masyarakat yang berasal dari etnis lain merasa adanya kedekatan dan kepercayaan terhadap pasangan calon, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari suku lain.

Dengan pendekatan politik simbolis tersebut para kandidat akan mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, untuk mendapatkan respons simbolis dapat menggunakan identitas etnis, agama, dan kelompok-kelompok partisipan yang diikuti, dengan harapan simbol-simbol tersebut bisa mempengaruhi kelompok-kelompok yang ada. Para kandidat mengembangkan

pemasaran politik untuk memasarkan dirinya maupun idenya biasanya dengan menggunakan ideologi ras atau etnisitas yang dirangkum dalam pesan politik sebagai sebuah strategi pemasaran dalam sebuah kegiatan pemilihan.

Dengan adanya kontestasi politik tersebut menimbulkan sebuah ketegangan etnis untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Pada pemilihan kepala daerah juga terlihat rasa solidaritas etnis yang melibatkan peranan tokoh masyarakat, tokoh adat dan kelompok kesukuan sebagai suatu gerakan politik dan etnis tersebut dijadikan sebagai obyek kepentingan politik mereka.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti apakah ada keterlibatan politik identitas etnis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai, dimana etnis atau suku masyarakat yang terdapat dalam daerah tersebut bervariasi. Dalam partisipasinya tersebut maka akan dapat dilihat apakah identitas etnis terlibat pada saat pemberian suara dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut ini:

1. Politik identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah.
2. Adanya indikasi keterlibatan identitas etnis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015.

3. Terjadinya persaingan yang melibatkan identitas etnis dalam momentum pemilihan kepala daerah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka peneliti hanya membatasi dalam Pola Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Walikota Binjai Tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana politik identitas etnis dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2015 di Kecamatan Binjai Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat keterlibatan etnis dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah didalam studi ilmu politik terutama tentang politik etnis dalam pemilihan kepala daerah, dan bermanfaat untuk diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi S-1 di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintahan Kota Binjai.
3. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah di bidang politik kewarganegaraan dengan fenomena politik etnis yang terjadi di masyarakat.